

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO

Sudarmono Sompah

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
Email: sudarmono\_sompah@gmail.com

## Abstract

*The aim of this research was to look at the implementation of government policies in the conservation of mangrove in Pohuwato regency. This research method using a case study explanative approach. Through the process of collecting data through observation, interviews and documentation, the data processed by reducing the data and then presented to provide an overview of policy implementation by local governments. Based on the results of the research, the percentage of the evaluation context (policy) found 95% categorized as very good, the evaluation of inputs (resources) found 96.4% categorized as very good, the evaluation process (implementation) found 90% categorized as very good, product evaluation (impact) found 75% categorized quite good. Then, from each of these results concluded that 93.3% considered excellent training program. In the implementation of the policy there are several factors that influence in the preservation of mangrove forest that is communication, bureaucratic structure, availability of resources that has to do with the funds, facilities and infrastructure advice and disposition factors as the attitude of the executive to implement the policy.*

**Keywords:** *Implementation of policies, mangrove forests, Pohuwato Regency.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan daerah. Pembangunan daerah sendiri senantiasa diarahkan untuk dapat lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa dan antar kota dengan desa. Sehingga sasaran utama dalam program pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan hal itu potensi daerah yang dimiliki dalam suatu wilayah perlu adanya pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengikat dari seluruh ketataaturan yang berlaku.

Salah satu potensi daerah yang perlu pelestariannya adalah hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki formasi hutan khas daerah tropik yang mempunyai sifat ekosistem yang

setimbang, proposional dan adaptif yang berbeda dengan tipe hutan lainnya. Tipe hutan mangrove terbentuk karena klimaks edafik (faktor edafik dalam keadaan maksimum). Faktor edafik yang berpengaruh langsung terhadap jenis tumbuhan hutan mangrove yakni sifat mineral, tanah, suhu, dan keadaan pergerakan air tanah, pasang surut serta salinitas (Rusila *et al*, 1999:19).

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya tumbuh dan berkembang biak di daerah tropis, seperti Indonesia. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat manusia (Bengen, 2001). Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*) dan daerah pembesaran (*nursery ground*) sebagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu adalah seresah mangrove (berupa dedaunan, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh ke perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan. Hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah)

bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia, dan jenis-jenis kehidupan lainnya (Bengen, 2000).

Hutan Mangrove di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Luas hutan mangrove khusus untuk Pohuwato hasil pemetaan Badan Planologi (2000) sebesar 9650,26 Ha. Sedangkan laju degradasi sebesar 10-20 Ha/tahun. Menurut data dari dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato tahun 2007 bahwa rehabilitasi hutan mangrove 300 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa hutan mangrove Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato telah mengalami degradasi yang cukup tinggi. Degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh perambahan, konversi lahan untuk pemukiman, pertambangan dan pertanian, abrasi dan penebangan untuk kayu bakar (anonim, 1999: 22).

Melihat kondisi tersebut membawa dampak terhadap kebutuhan masyarakat yaitu adanya pertambahan penduduk dan perkembangan wilayah yang demikian pesat membawa konsekuensi pemenuhan akan kebutuhan terhadap sumberdaya alam semakin meningkat. Tekanan ini akan menyebabkan laju degradasi sumberdaya alam khususnya hutan mangrove di wilayah pesisir semakin besar oleh pemanfaatan alih fungsi kebutuhan lahan untuk tambak, pemanfaatan kayu bakau untuk bangunan, kayu bakar, dan lain-lain. Kondisi degradasi ini akan mengganggu ekosistem alami hutan mangrove. Sifatnya yang labil akan menyebabkan perkembangan vegetasi terganggu, zonasi kawasan menjadi tidak proposional lagi, fungsi kawasan menjadi hilang yang berdampak lanjut pada musnahnya ekosistem hutan mangrove tersebut.

Menyingkapi permasalahan tersebut diperlukan adanya campur tangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pelestarian Kawasan Hutan Mangrove sesuai dengan kondisi dan pemanfaatannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian kawasan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus eksplanatif. Penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan operasional yang menuntut pelacakan tertentu yang dikondisikan dengan waktu tertentu, yaitu penggunaan studi kasus disesuaikan dengan tipe-tipe pertanyaan seperti “bagaimana” atau “mengapa” dan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana penelitiannya hanya memiliki peluang kecil atau tidak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari beberapa dinas terkait seperti yang disebutkan sebelumnya dan data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak ketiga. Melalui proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data diolah dengan mereduksi data dan kemudian disajikan untuk dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1: Luasan jenis tutupan hutan mangrove berdasarkan fungsi menurut PKHP (Ha) di Kabupaten Pohuwato

No.	Jenis tutupan	HL	HP	HPT	HPK	APL	HK	Total
1.	Hutan Mangrove Primer	2.707	0	13	0	2.614	263	5.597
2.	Hutan Mangrove Sekunder	122	0	0	0	503	2.568	3.193
Jumlah		2.829	0	13	0	3.117	2.831	8.790

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Gorontalo

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 492/KPTS-I/1999 mengenai Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara yang dilampiri Peta Kawasan Hutan dan

Perairan (PKHP), kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato terdiri dari cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan areal penggunaan lain. Menurut sumber Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato bahwa untuk jenis tutupan mangrove di Kabupaten Pohuwato terbagi atas hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder, selanjutnya dilaporkan bahwa berdasarkan penafsiran citra satelit skala 1:100.000 Tahun 2005, jenis tutupan hutan mangrove primer sebesar 1,29% dan hutan mangrove sekunder 0,74% (Tabel 1). Status hutan mangrove berdasarkan hasil overlay peta tutupan lahan dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan (PKHP) dan Peta Rancangan Peruntukan Kawasan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 bahwa kedudukan hukum dari kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato sudah jelas.

Berdasarkan fungsi menurut PKHP bahwa kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yang berstatus sebagai Hutan Lindung (HL) seluas 2.829 ha, sedangkan berdasarkan fungsi menurut rancangan peruntukan hanya seluas 1.867 ha. Sementara untuk status Kawasan Hutan Konservasi (HK) luasnya berdasarkan fungsi PKHP sebesar 2.831 Ha, sedangkan berdasarkan fungsi menurut rancangan peruntukkan hanya 2.560 ha. Luasan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan fungsi menurut PKHP seluas 3.117 ha, sedangkan berdasarkan fungsi menurut rancangan peruntukkan seluas 2.278 Ha, sedangkan berdasarkan fungsi menurut rancangan peruntukkan seluas 2.278 ha. Tabel 1 menunjukkan ada kawasan untuk Hutan Produksi (HP) seluas 13 ha, sedangkan Tabel 2 menunjukkan hutan produksi (Kawasan Budidaya Kehutanan) meningkat menjadi 2.082 ha.

Tabel 2. Luasan jenis tutupan hutan mangrove berdasarkan fungsi menurut PKHP (Ha) di Kabupaten Pohuwato

No.	Jenis Tutupan	HL	HP	HPT	HPK	APL	HK	Total
1.	Hutan Mangrove Primer	2.707	0	13	0	2.614	263	5.597
2.	Hutan Mangrove Sekunder	122	0	0	0	503	2.568	3.193
	Jumlah	2.829	0	13	0	3.117	2.831	8.790

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato (2006)

### Luas Areal Kawasan Mangrove di Kabupaten Pohuwato

Provinsi Gorontalo mempunyai luas daerah 12.215,45 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,15% dari luas Indonesia, dengan garis pantai mencapai 590 km (317,90 mil), yang terdiri dari panjang garis pantai sebelah selatan 320 km (172,4 mil) dan sebelah utara 270 km (145,5 mil),

memiliki luas tutupan lahan dengan dominasi kelas vegetasi lahan basah rapat (hutan mangrove) sebesar 5.876,61 ha, yang terdiri dari 4,168 ha atau sekitar 0,665% terbesar di daerah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan 1.708,61 ha atau 0,31% terbesar di daerah Kabupaten Gorontalo (Anonim, 1995).

Tabel 3. Persentase penyebaran luas kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kabupaten Boalemo-Pohuwato	4.168,00	65,0
	- Kecamatan Popayato	2.169,73	52,06
	- Kecamatan Marisa	1.348,60	32,37
	- Kecamatan Tilamuta	382,94	9,19
	- Kecamatan Paguyaman	215,81	5,18
	- Kecamatan Paguat	50,56	1,21
2.	Kabupaten Gorontalo	1.708,61	31,0
	- Kecamatan Kwandang	1.102,81	64,54
	- Kecamatan Sumalata	605,80	35,46
	Total	5.876,61	

Sumber : Anonim (2002b), dalam Lasantu (2006)

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato setiap

tahunnya mengalami penurunan luasan, yang sebelumnya memiliki luas  $\pm$  168 ha, maka

berdasarkan hasil interpretasi citra tahun 2002-2003 bahwa luas hutan mangrove yang masih mempunyai vegetasi tanaman (Lasantu, 2006), selanjutnya dijelaskan bahwa penurunan luasan hutan mangrove ini dikarenakan adanya tekanan yang cukup tinggi oleh penduduk sekitar untuk bisa memanfaatkan peluang ekonomi di wilayah tersebut menjadi lahan pertanian, perkebunan,

pemukiman, pemenuhan kayu bakar dan sebagian besar untuk mengembangkan sektor perikanan khususnya untuk pembukaan lahan tambak. Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak seimbang ini tentunya akan berakibat pada turunya mutu lingkungan disertai dengan rusaknya pola ekosistem pesisir. Persentase penyebaran luas kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Luasan habitat asli kawasan mangrove di Provinsi Gorontalo

No.	I. Kabupaten Boalemo	Luas
1.	Kecamatan Botumoito	339,76 Ha
2.	Kecamatan Dulupi	769,98 Ha
3.	Kecamatan Mananggu	1.005,48 Ha
4.	Kecamatan Paguyaman	48,76 Ha
5.	Kecamatan Paguyaman Pantai	275,47 Ha
6.	Kecamatan Tilamuta	323,15 Ha
	Jumlah	2762,60 Ha
II.	Kabupaten Gorontalo	
1.	Kecamatan Anggrek	2.167,92 Ha
2.	Kecamatan Atinggola	405,53 Ha
3.	Kecamatan Kwandang	2.290,84 Ha
4.	Kecamatan Sumalata	296,56 Ha
5.	Tolinggula	323,08 Ha
	Jumlah	5.483,93 Ha
III.	Kabupaten Pohuwato	
1.	Kecamatan Lemito	4.164,95 Ha
2.	Kecamatan Marisa	1.617,83 Ha
3.	Kecamatan Paguat	1.103,65 Ha
4.	Kecamatan Patilanggio	5.928,65 Ha
5.	Kecamatan Popayato	2.925,50 Ha
6.	Kecamatan Randangan	9.497,51 Ha
	Jumlah	25.688,09 Ha

Sumber data: BP-Das Bone Bolango, 2007

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa total luasan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo tahun 2002 seluas 4.168,00 ha, sementara data dari dinas kehutanan Kabupaten Pohuwato (2008) bahwa luasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato saja tahun 2007 seluas  $\pm 8.790$  ha. lebih jelas dapat dilihat Tabel 3. Sompah (2005) melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan Badan Planologi (2000), luas hutan mangrove khusus untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 9.650,26 ha dengan laju degradasi sebesar 10-20 ha/ tahun. degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh perambahan, konservasi lahan untuk pemukiman, pertambahan dan pertanian, abrasi dan penebangan untuk kayu bakar. Berdasarkan data BP-DAS Bone Bolango (2007) bahwa sampai saat ini tidak tersedia peta inderaja (citra satelit) dan GIS Provinsi Gorontalo yang mendukung kegiatan sistem penilaian tingkat kekritisan lahan mangrove di Provinsi

Gorontalo. oleh karena itu pelaksanaan sistem penilaian tingkat kerusakan mangrove di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan cara survey langsung (terestris). Pada Tabel 4 menjelaskan bahwa luasan habitat asli di kawasan mangrove Provinsi Gorontalo pada beberapa kabupaten dan kota berdasarkan land *system khy* (kahayan), *kjp* (kajapah), dan *ptg* (petagan) seluas 33.934,62 ha.

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato yang mempunyai wilayah terbesar yaitu seluas 25.688,09 ha dan yang terkecil adalah Kabupaten Boalemo dengan luas 2.762,60 ha. Kerusakan sumber daya hutan yang terjadi di semua fungsi kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama hutan mangrove, hal ini diakibatkan dari lemahnya institusi kehutanan, penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan, meningkatnya eksploitasi hutan secara berlebihan, maraknya perambahan hutan dan penebangan secara ilegal, kebakaran hutan yang sulit

dikendalikan, dan lemahnya kesadaran serta kepedulian terhadap ekosistem daerah aliran sungai. Kerusakan kawasan hutan mangrove yang paling esensial adalah disebabkan adanya komitmen pemerintah yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian

dengan adanya kebijakan yang dipaksakan yakni hutan sebagai sumber pokok dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Tingkat kekritisn kawasan mangrove di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat kekritisn mangrove Di Kabupaten Pohuwato

No.	Kecamatan	Rusak Berat	Tidak Rusak	Jumlah
1.	Kecamatan Lemito	1.738,27	1.837,82	3.576,09
2.	Kecamatan Marisa	987,83	223,52	1.211,35
3.	Kecamatan Paguat	652,69	152,19	804,88
4.	Kecamatan Patilanggio	3399,29	290,96	3.690,25
5.	Kecamatan Popayato	1.510,92	1.355,03	2.865,95
6.	Kecamatan Randangan	5.728,58	264,10	5.992,68
	Jumlah	14.017,58	4.113,78	18.141,20

Sumber Data: BP DAS Bone Bolango Tahun 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa total luasan mangrove untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 25.678,25 ha. Adapun luasan untuk kategori yang rusak berat 14.017,58 ha, kategori rusak 7.546,89 ha, dan kategori tidak rusak 4.113,78 ha. data ini memberikan gambaran bahwa kondisi kawasan mangrove di Kabupaten Pohuwato ini sudah lebih dari  $\pm$  50% yang sudah rusak berat dan hanya 18% yang masih baik. Kerusakan habitat mangrove ini akibat perluasan tambak oleh petani nelayan dan pengusaha ikan.

Melihat kondisi hutan sebagaimana di atas, maka potensi untuk memperbaiki kondisi hutan di Kabupaten Pohuwato sangat besar, antara lain melalui kegiatan rehabilitasi hutan maupun penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove yang merupakan program pesisir yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Di samping itu bertambahnya jumlah penduduk dan dinamika masyarakat global maka tekanan dan gangguan terhadap ekosistem hutan meningkat. Oleh sebab itu perlu adanya pendekatan dan penanganan yang serius serta dukungan semua pihak dan *stakeholders* sangat diharapkan, guna mengembalikan fungsi dan kaidah-kaidah hutan yang telah menurun drastis bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di sekitar pesisir dan kelautan. kegiatan pembangunan tidak perlu merusak ekosistem pantai dan hutan mangrove, sehingga perlu mengikuti penataan

yang rasional, yaitu dengan memperhatikan segi-segi fungsi ekosistem pesisir dan lautan dengan menata semua pantai dan mengkonservasi jalur hijau hutan mangrove untuk perlindungan pantai, pelestarian siklus hidup biota perairan pantai. Dalam perkembangan selanjutnya dalam pembahasan ini terfokus pada dua variabel yaitu implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam upaya pelestarian kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. Hal ini diarahkan kepada implementasi kebijakan pemerintah daerah mengingat luas areal hutan mangrove yang dirambah saat ini, dilarang keras untuk menambah luas rambahannya. Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2002 merupakan peraturan yang terdiri dari 11 bab dan 102 pasal. Dalam bagian menimbang dijelaskan bahwa PP No. 34 Tahun 2002 dibuat dalam rangka pelaksanaan dari Bab V, Bab VII dan Bab XV UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan demikian pada dasarnya PP 34 Tahun 2002 secara sekaligus telah merangkum sepuluh hal yang disebutkan akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Solichin (1997) menyatakan bahwa secara garis besar PP ini mengatur delapan hal utama yaitu: (1) pengaturan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan, (3) industri primer hasil hutan, (4) hutan hak, penggunaan kawasan hutan, (5) peredaran dan pemasaran hasil hutan, (6) pembinaan dan pemasaran hasil hutan, pembinaan, (7) pengendalian, dan pengawasan, serta (8) sanksi administratif

terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, dan izin industri primer hasil hutan. namun, pada intinya pengaturan tersebut lebih dititik beratkan pada dua hal yaitu: (1) bahwa PP ini mengatur kegiatan pengurusan hutan mulai dari penataan hutan sampai pada kegiatan pengolahan hasil hutan dalam industri primer (termasuk penertiban tata usaha hasil hutan dan mekanisme pemberian izin); serta (2) pemberian sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan dan izin industri primer. dari pembagian ini, dapat terlihat bahwa pada dasarnya isi PP No. 34 Tahun 2002 ini adalah mengenai bentuk pengelolaan hutan dan mekanisme perizinannya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yaitu diarahkan pada faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Implementasi kebijakan dalam pembahasan ini akan lebih mengacu pada pendekatan empiris, yaitu menggambarkan fakta-fakta pendukung program dan kegiatan yang berkorelasi dengan upaya pelestarian kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Mangrove**

Pengelolaan dan penguasaan hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pohuwato telah mengalami perubahan-perubahan kebijakan yang akan berpengaruh, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan terutama kawasan hutan mangrove ditempuh dengan adanya kebijakan baru mengenai pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Dalam upaya melestarikan hutan mangrove pemerintah kabupaten telah melakukan suatu kebijakan pembinaan dan intruksi terhadap masyarakat. Hal ini diarahkan kepada ekosistem hutan mangrove dimana kehidupan masyarakat desa di sekitar hutan, tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan kekerabatan antar warga dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya.

Hubungan tersebut pada akhirnya akan memberikan ciri khas bagi kehidupan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove merupakan hal sangat tepat dalam mengimplementasikan

kebijakan pemerintah terutama melihat ekosistem hutan mangrove memiliki beberapa sifat kekhususan dipandang dari kepentingan sumberdaya alam, yakni letak hutan mangrove terbatas pada tempat tertentu, peranan ekologis ekosistem hutan mangrove bersifat khas, berbeda dengan peran ekosistem hutan lainnya, dan hutan mangrove memiliki potensi hasil yang bernilai ekonomis tinggi, serta hutan mangrove sebagai sumber daya alam yang dapat dipulihkan pendayagunaannya memerlukan pengelolaan yang tepat, sejauh mungkin dapat mencegah pencemaran lingkungan hidup dan menjamin kelestariannya untuk keperluan masa kini dan akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa pengelolaan hutan mangrove secara lestari yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bahan kajiannya bahwa salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain: pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. sedangkan fungsi ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sebagian masyarakat dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, pemukiman, industri dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.

Selanjutnya dalam sistem kelembagaan dan perangkat hukum dimana, departemen pertanian dan kehutanan, serta departemen kelautan dan perikanan, merupakan lembaga yang sangat berkompeten dalam pengelolaan mangrove. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan mangrove adalah mendesak untuk dilakukan saat ini. Aspek perangkat hukum adalah peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan mangrove. Sudah cukup banyak sistem peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dalam pengelolaan mangrove. Yang diperlukan sekarang ini adalah penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perangkat hukum tersebut.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah**

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu dalam konteks pembahasan tersebut dalam implementasi kebijakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelestarian hutan mangrove yaitu *pertama*, komunikasi, bagaimana menginformasikan semudah mungkin dapat dipahami oleh masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan yang diambil. *Kedua*, struktur birokrasi yaitu didukung institusi pelaksana yang tidak berbelit-belit dan sederhana. *ketiga*, sumber daya yaitu tersedianya sumber-sumber dana, daya dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang cukup, *keempat*, faktor disposisi sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, perlu didukung oleh suatu sikap dan petunjuk yang bertanggung jawab.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, hasil persentase evaluasi *context* (kebijakan) memperoleh 95% dikategorikan sangat baik, evaluasi *input* (sumber daya) memperoleh 96,4% dikategorikan sangat baik, evaluasi *process* (pelaksanaan) memperoleh 90% dikategorikan sangat baik, evaluasi *product* (dampak) memperoleh 75% dikategorikan cukup baik. Kemudian dari masing-masing hasil tersebut disimpulkan bahwa 93,3% program pelatihan dikategorikan sangat baik. Pengembangan karawo perlu terus dikembangkan agar dapat diterima oleh semua kalangan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kompetensi pengrajin terkait perpaduan warna, pengkayaan motif, dan pengembangan teknik penggunaan

jenis kain lain tidak hanya kain sutra, tafeta, sifon. Pengembangan informasi dan pemasaran perlu terus dikaji dan dikembangkan untuk mendorong peningkatan omset penjualan dan perluasan pasar bagi produk karawo sehingga mampu berbicara bukan hanya di tingkat lokal namun juga nasional bahkan internasional. Terkait dengan hal ini, publikasi dan pengkayaan informasi baik melalui Koran, website maupun sarana lainnya perlu terus dilakukan khususnya oleh dinas/ instansi terkait sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap karawo. Perlunya peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan karawo antara lain melalui sinergi program dan alokasi dana pada APBD. Perlunya peningkatan kepedulian pemerintah dan dinas terkait untuk pengembangan sulaman karawo, terutama perhatian terhadap upah pengrajin yang masih sangat rendah dan penstabilan harga bahan baku dengan memfasilitasi pengrajin untuk mendapatkan bahan baku dengan mudah dan murah. Untuk memperkuat permodalan, perlu adanya penguatan kelompok pengrajin dan kemudahan mendapatkan kredit modal usaha di lembaga keuangan mikro.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 1999. Laporan Tahunan Pelaksanaan Proyek Pengelolaan Hutan Mangrove Provinsi Sulawesi Utara. Proyek Pengelolaan Hutan Bakau Provinsi Sulawesi Tengah. Manado.
- Bengen D G. 2000. Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bengen D G. 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
- Dahuri R. Rais. Ginting S P, M J Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Indonesia.
- Rusila Y N. Khazali M. Suryadiputra INN. 1999. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Ditjen PKA dan Wetlands International Indonesia Program. Bogor.
- Soetrisno K. Agung M S. 1994. Pengembangan Aspek Sosial Ekonomi Pengusahaan Hutan Mangrove. Panel

Diskusi Pembangunan Hutan Mangrove Berkelanjutan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Departemen Kehutanan. Jakarta.

Solichin A W. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi II Cetakan I. Bumi Aksara. Jakarta.